

PROYEKSI RESTITUSI SEBAGAI JENIS PIDANA BARU DALAM RUU KUHP

**Oleh:
NORCHA SATRIA ADI NUGROHO
E1A115068**

ABSTRAK

Restitusi merupakan bentuk perlindungan hukum kepada korban tindak pidana yang diberikan untuk menghindarkan dari kerugian yang terjadi akibat tindak pidana dan proses penyelesaiannya. Meskipun restitusi sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia akan tetapi masih belum bisa menyelesaikan permasalahan yang dialami korban tindak pidana. Dibentuknya RUU KUHP menawarkan model restitusi baru yang disebut sebagai pidana pembayaran ganti kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proyeksi implementasi konsep menjadikan restitusi sebagai jenis pidana dalam sistem hukum Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan dianalisis secara normative kualitatif berdasarkan norma dan teori/doktrin ilmu hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proyeksi restitusi sebagai jenis pidana sesuai untuk diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia. Namun dalam konsep yang ditawarkan dalam RUU KUHP masih ada hambatan-hambatan dalam komponen struktur, komponen substansi, komponen kultur. Sehingga diperlukan upaya dari pemerintah untuk menyempurnakan rumusan pidana pembayaran ganti kerugian salah satunya dengan mengimplementasikan elemen-elemen dari konsep restitusi dari negara lain.

I
Katakunci: Restitusi, Jenis Pidana, RUU KUHP

PROJECTION OF RESTITUTION AS FORM OF SANCTIONS IN THE CRIMINAL CODE BILL

By:
NORCHA SATRIA ADI NUGROHO
E1A115068

ABSTRACT

Restitution is a legal protection given to protect victims of criminal acts from losses incurred as a result of criminal acts and during handling cases. Although restitution has been regulated in various laws in Indonesia, it still cannot fully resolve the problems experienced by victims of criminal acts. The establishment of the Criminal Code Bill offers a new model of restitution called sanctions to pay for restitution. This study aims to determine the projected implementation of the concept of making restitution as a form of sanction in the Indonesian legal system. The approach method used is juridical sociology and normative qualitative analysis based on norms and theories / doctrines of law. The research specification used is descriptive analytical. The method of data collection in this study uses interviews and library research. The results of this study indicate that the projection of restitution as a form of sanctions is suitable to be implemented in the Indonesian legal system. But in the concept offered in the Criminal Code Bill there are still obstacles in the components of structural, substance, culture. So that government need to improve the formulation of sanctions to pay for restitution, one of which is by implementing elements of the concept of restitution from other countries.

Keywords: Restitution, Form of Sanctions, Criminal Code Bill